

# KLIPING BERITA

Sumber : Suara NTB

15 Juli 2023

LOMBOK TENGAH

## Disoal BPK, Loteng Bentuk Tim Pengamanan Aset

*BYSUARANTB.COM 15 JULI 2023*

**Praya (Suara NTB)** – Tim pengamanan aset daerah telah dibentuk Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) untuk membantu menuntaskan persoalan aset daerah yang diduga banyak bermasalah. Bahkan, dalam audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 lalu, persoalan aset jadi yang paling disorot BPK. Terakhir, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Loteng turun merekomendasikan supaya pemerintah daerah tegas dalam penyelesaian aset-aset daerah yang bermasalah di daerah.

“Sudah ada tim pengamanan aset yang dibentuk oleh pemerintah daerah,”terang Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Loteng, Taufikurrahman PN., kepada *Suara NTB*, Jumat, 14 Juli 2023 kemarin. Tugasnya, melakukan verifikasi dan validasi aset-aset milik daerah. Termasuk membantu mengidentifikasi persoalan aset yang ada.

Khususnya aset-aset daerah yang tidak sedang digunakan maupun yang dikelola oleh masyarakat. Karena ada juga aset daerah yang masih dikelola dan dikuasai oleh masyarakat. “Kalau aset daerah yang masih digunakan untuk pelayanan public, tidak ada persoalan. Yang banyak bermasalah ini aset daerah yang tidak digunakan. Sehingga masyarakat masuk untuk mengelola kemudian aset daerah tersebut,”jelasnya.

Selain itu, tim pengamanan asset juga akan membantu merumuskan pola pengelolaan asset daerah yang ada. Supaya asset-aset yang tidak digunakan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan system sewa atau seperti apa nantinya. Terpenting asset tersebut bisa mendatangkan pemasukan bagi daerah.

“Sembari kita memvalidasi asset-aset yang ada, juga tengah dirumuskan system pengelolaan asset-aset daerah tersebut kedepannya. Harapannya, masyarakat bisa mengelola asset tersebut. Dan, pemerintah bisa memperoleh pemasukan dari hasil pengelolaan asset oleh masyarakat tersebut,” jelasnya.

Menurutnya, potensi pemasukan dari hasil pengelolaan asset daerah cukup besar. Antara Rp 4 sampai 5 miliar pertahun, jika mampu dikelola dengan optimal. Sehingga untuk mendorong optimalisasi potensi tersebut, tim pengamanan asset mulai bergerak mendata dan memvalidasi asset-aset yang ada.

“Kan dari pada asset daerah tidak dimanfaatkan, mending dikelola oleh masyarakat. Tentunya dengan system yang sama-sama saling menguntungkan. System inilah yang saat ini sedang kita rumuskan,” tegas mantan Kepala Dinas Pertanian Loteng ini.

Mengingat, persoalan asset cukup komplet maka butuh proses untuk bisa menuntaskan persoalan asset yang ada. Mengingat, persoalan tidak sama satu dengan yang lain. Sehingga butuh upaya keras dengan melibatkan semua organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menyelesaikan persoalan asset ini.

Karena terkait pengelolaan dan pemanfaatan asset daerah itu sendiri, menjadi ranah kewenangan OPD terkait. BKAD dalam hal ini hanya mendata dan memverifikasi asset yang ada dimasing-masing OPD lingkup Pemkab Loteng. **(kir)**